

DETERMINAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH : UKURAN PEMDA, LEVERAGE, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA

Kiswanto¹, Dian Fatmawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

¹kiswanto@mail.unnes.ac.id, ²dianfatmawati80@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of size, leverage, audit findings, and follow-up of audit recommendation to the local governance performance in Java Island. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD. Population of this research is all the district/city in Java Island during 2014. According to purposive sampling method, this study employs sample of 109 local government in Java Island in 2014. Research data analysis using descriptive analysis statistical and multiple regression analysis with SPSS version 21. The result demonstrate that size and follow-up of audit recommendation have significant positive effect on the performance of local government districts/cities in Java Island. Audit findings significant negative effect on the performance of local government districts/cities in Java Island. Leverage had no significant effect to the performance of local government districts/cities in Java Island. Based on the research result can be conclude furthermore that size and follow-up of audit recommendation can increase performance of local government.

Keywords: *Local government performance; Size; Leverage; Audit findings; Follow-up of audit recommendation*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran daerah, leverage, temuan audit, dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja pada evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang diambil dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling. Sampel diperoleh sebanyak 109 pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan program SPSS versi 21. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ukuran daerah dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran daerah dan tindak lanjut hasil audit yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: *Kinerja pemerintah daerah; Ukuran daerah; Leverage; Temuan audit; Tindak lanjut rekomendasi audit*

Cronicle of Article: Received (April 2019); Revised (May 2019); and Published (June 2019).

©2019 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Kiswanto and Dian Fatmawati are from Accounting Study Program Faculty of Economy Universitas Negeri Semarang. Corresponding author: kiswanto@mail.unnes.ac.id1; dianfatmawati80@gmail.com2

How to cite this article: Kiswanto. & Fatmawati, Dian. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. Jurnal Kajian Akuntansi 3 (1). 44-54

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa terdapat delegasi kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, serta moneter dan fiskal nasional, dan agama. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mempromosikan penyampaian layanan pemerintah yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Rusmin et al., 2014) sehingga mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adanya otonomi daerah berarti semakin besar peluang pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadikan pemerintah daerah semakin mandiri dan tidak bergantung pada sumber dana bantuan pemerintah pusat baik dalam pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pembangunan daerah. Salah satu tantangan pemerintah daerah menghadapi otonomi saat ini adalah meningkatkan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber dan potensi kekayaan asli daerah serta dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik (Anjani, 2008), (Rahmawati & Fajar, 2017).

Pengendalian pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Salah satu bentuk pengendalian pemerintah pusat atas pemerintah daerah adalah dilakukannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan

atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengungkapan kinerja diperlukan untuk menunjukkan prestasi pelayanan masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Bagi legislatif (pusat maupun daerah), indikator yang jelas dan terukur serta metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Ulum, 2012).

UU No. 32 Tahun 2004 mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Menurut Pasal PP No.3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Sehingga diterbitkan Permendagri No. 73 Tahun 2009 guna melengkapi PP No. 6 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama guna memperoleh informasi capaian kinerja bagi tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Metode yang digunakan dalam EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja pemerintah daerah. Komposit dari total indeks kinerja pemerintah daerah berasal dari penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat yakni lebih dari

setengah (65%) populasi Indonesia. Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan pembangunan tertinggi. Kegiatan ekonomi di Indonesia cenderung terkonsentrasi di dipulau Jawa. Kekayaan SDA, angkatan kerja berpendidikan, pasar domestik tumbuh secara cepat,

digabungkan dengan kondisi sarana prasarana lengkap menjadi faktor penentu keunggulan Pulau Jawa (Kemendagri, 2017). Kinerja nasional masih berpusat di Pulau Jawa, dimana Tabel 1 dan Tabel 2 berikut memberikan data tersebut.

Tabel 1. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Berprestasi Paling Tinggi Secara Nasional 2014

Peringkat	Kabupaten	Skor	Prestasi
1	Tulungagung	3,4370	ST
2	Pinrang	3,4194	ST
3	Sidoarjo	3,4187	ST
4	Pasaman	3,3957	ST
5	Nganjuk	3,3921	ST
6	Bantul	3,3720	ST
7	Lamongan	3,3684	ST
8	Kudus	3,3150	ST
9	Kulonprogo	3,3140	ST
10	Bintan	3,3137	ST

Sumber: <http://otda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang Berprestasi Paling Tinggi Secara Nasional 2014

Peringkat	Kota	Skor	Prestasi
1	Surabaya	3,2920	ST
2	Semarang	3,2432	ST
3	Probolinggo	3,2399	ST
4	Samarinda	3,2349	ST
5	Madiun	3,2055	ST
6	Balikpapan	3,2038	ST
7	Surakarta	3,1366	ST
8	Malang	3,1313	ST
9	Blitar	3,1190	ST
10	Mojokerto	3,0931	ST

Sumber: <http://otda.kemendagri.go.id/>

Tabel 3. menampilkan urutan peringkat lima skor tertinggi dan lima skor terendah pencapaian skor kinerja pemerintah daerah

tahun 2014 serta nilai temuan serta total asset yang dimiliki pemerintah daerah.

Tabel 3. Skor Kinerja, Total Aset, dan Nilai Temuan 10 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Nilai Temuan	Total Aset
1	Tulungagung	3,4370	832.195	2.560.868.858
2	Sidoarjo	3,4187	21.924.801	9.710.496.819
3	Nganjuk	3,3921	389.010	2.147.663.627
4	Bantul	3,3720	3.143.673	3.206110.752
5	Lamongan	3,3684	15.052.687	4.205.271.868
6	Tegal	2,6779	1.835.810	2.950.322.611
7	Wonogiri	2,6426	581.318	3.289.682.423
8	Pemalang	2,6060	4.830.146	2.984.120.344
9	Serang	2,5519	6.134.512	1.982.746.489
10	Grobogan	2,3544	184.820	2.545.404.451

Sumber: Data olahan (2019)

Tabel 3. Menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung memperoleh peringkat pertama kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan total aset sebesar 2.560.868.858. Hal ini menjadi menarik ketika Kabupaten Wonogiri dengan total aset 3.289.682.423 menunjukkan peringkat ke empat terbawah skor kinerjanya. Lebih lanjut, temuan BPK menunjukkan angka yang bervariasi. Kabupaten Tulungagung sebagai kabupaten dengan skor tertinggi memiliki nilai temuan sebesar 832.195, dan Kabupaten Sidoarjo dengan nilai temuan sebesar 21.924.801, berbeda tipis dengan Kabupaten Grobogan yang berada pada peringkat terbawah dengan temuan sebesar 184.820. Beberapa uraian di atas memberikan gambaran bahwa tingginya peringkat kinerja di Pulau Jawa tetapi secara empiris juga dilaporkan bahwa nilai temuan atas ketidakpatuhan terhadap pengelolaan keuangan juga tinggi sehingga menuntut pemerintah untuk terus mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Telah banyak penelitian yang mengkaji tentang Kinerja pemerintah daerah, namun hasil masih berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah, *leverage*, serta *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun kemakmuran dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Mustkarini (2012), menunjukkan ukuran pemerintah, kekayaan daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, belanja daerah dan hasil temuan audit secara signifikan berpengaruh terhadap variabel kinerja pemda. Sudarsana (2013) menemukan bahwa kekayaan daerah secara positif berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda, sedangkan temuan audit BPK berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Namun, ukuran daerah, belanja modal, dan

ketergantungan pemerintah pusat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemda.

Adanya fenomena gap dan ditemukannya hasil yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai kinerja pemerintah daerah. Disamping itu, peringkat dan skor kinerja pemerintah daerah di terbitkan setiap periode, sehingga perlu adanya evaluasi yang dilakukan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris terkait pengaruh ukuran daerah, *leverage*, temuan audit, serta tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kinerja.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didasari oleh *stewardship theory*. *Stewardship theory* merupakan teori yang menjelaskan situasi manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama bagi kepentingan perusahaan. *Stewardship theory* memberikan pandangan bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya guna bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan publik maupun *stakeholder*. Ketika ada perbedaan antara kepentingan pemilik dan steward maka steward akan berusaha untuk bekerja sama. Dalam *stewardship theory* rakyat berperan sebagai “*principal*” sedangkan pemerintah berperan sebagai “*steward*”. Menurut *stewardship theory* pemerintah dianggap telah bekerja atas dasar motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat (Susanto, Yusuf & Rachmawati I, 2015).

Pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memerlukan dukungan oleh aset yang baik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Aset menunjukkan besar kecilnya suatu daerah. Daerah yang memiliki aset lebih besar akan memiliki

tuntutan lebih besar dalam pengungkapan wajib melalui laporan keuangan untuk publik (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Ukuran daerah mempengaruhi tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, daerah dengan total aset lebih besar juga akan memberikan keuntungan dalam kegiatan operasional, sehingga pemerintah daerah akan dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan *stewardship theory* bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran kepentingan perusahaan. Hal ini menunjukkan juga bahwa pemerintah telah bekerja keras atas dasar motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat. Ukuran daerah yang menggambarkan total aset mampu mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berarti bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* mampu mengelola aset yang dimilikinya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik untuk mensejahterakan rakyat sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengembangan Hipotesis

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa pelayanan dapat diberikan oleh pemerintah daerah jika didukung dengan aset yang dimiliki. Sehingga, sangat diperlukan sumber daya serta fasilitas yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipertegas kembali oleh Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriasisi (2012) serta Kusumawardani (2012) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran daerah berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Leverage berpengaruh terhadap penggunaan aktiva, dimana penggunaan aktiva oleh pemerintah daerah harus dapat menutup biaya tetap. Besarnya utang

pemerintah yang bersumber dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan pemerintah berasal dari pihak eksternal. *Leverage* pada Sektor Publik digunakan kreditor guna mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Sesotyaningtyas (2012) dan Perwitasari (2010) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan *leverage* yang tinggi akan memiliki kinerja buruk, hal ini disebabkan oleh sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal. Weill (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *leverage* dan pengukuran kinerja suatu entitas. Selanjutnya, Minarsih (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Stewardship theory menyatakan bahwa *steward* akan memiliki motivasi untuk bertindak secara baik pada prinsipalnya. Cara terbaik yang dilakukan *steward* yaitu dengan tidak menggunakan sumber pendanaan kegiatan pemerintahan dari pihak eksternal. Jika sumber pendanaan kegiatan operasional pemerintahan dari pihak eksternal dan apabila pemerintah tidak mampu untuk membayar kewajiban tersebut, justru akan membuat kinerja pemerintah daerah menjadi turun ataupun buruk. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah

Temuan BPK lebih banyak terhadap laporan keuangan pemda, khususnya pelanggaran yang dilakukan daerah tertentu yaitu melanggar ketentuan pengendalian intern maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Temuan audit diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh BPK. Hasil pemeriksaan merupakan hasil proses penilaian secara profesional berbasis standar yang telah ditetapkan terhadap keandalan sebuah data atau informasi mengenai pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Bernstein (2010) mengungkapkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja pemda, sistem pengawasan, termasuk audit kinerja, serta evaluasi program. Buruknya kinerja pemerintah daerah dapat tercermin dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah pengawasan, karena pengawasan tersebut dilakukan guna menjamin keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah (Yulianintyas, 2011).

Stewardship theory menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan perusahaan. Pemerintah sebagai *steward* berkewajiban melaksanakan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu terciptanya kesejahteraan bersama. Apabila terdapat temuan yang dapat merugikan organisasi, maka tujuan bersama tidak akan tercapai. Ketidaktaatan ketentuan hukum menyebabkan kerugian negara atau daerah, potensi kerugian negara atau daerah, kekurangan pendapatan, kelemahan administrasi, kurangnya berhemat, inefisiensi, dan ketidakefektifan (Gamayuni, 2016). Jumlah temuan audit juga harus dikomunikasikan kepada manajemen untuk perbaikan lebih lanjut (Lestiani, 2012). Temuan-temuan yang ditemukan akan berakibat menurunnya kinerja pemerintah daerah karena salah satu pihak akan merasa dirugikan. Semakin banyak pelanggaran oleh pemda menunjukkan buruknya kinerja pemda tersebut. Sehingga, semakin tinggi temuan audit, maka semakin rendahnya kinerja suatu pemda. Mustikarini dan Fitriyasi (2012) membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah

Pasal 1 angka 12 UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa rekomendasi merupakan saran oleh pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai dasar perbaikan bagi pengambil keputusan entitas tertentu. Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Tindak lanjut yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat mencerminkan pengelolaan pemda yang baik (*good governance*). Hal tersebut didukung oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK berpengaruh secara positif terhadap tata kelola pemerintah yang baik.

Sesuai *stewardship theory* yang menyatakan bahwa *steward* akan memiliki motivasi guna bertindak secara baik terhadap prinsipalnya, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha melaksanakan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut semakin meningkat. maka, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan desain penelitian *hypothesis testing study* guna menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Data penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini

sebanyak 119 Kabupaten Kota di Pulau Jawa anggaran 2014. Teknik pengambilan

sampel adalah *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4: Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Pemda
1.	Jumlah seluruh Pemda di Pulau Jawa Tahun 2014	119
2.	Pemda setingkat provinsi	(6)
3.	Data <i>outlier</i>	(4)
Jumlah sampel akhir penelitian		109

Sumber: Rangkuman penulis, 2017

Variabel penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan empat variabel

independen yang secara ringkas dijelaskan Tabel 5.

Tabel. 5 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	Kinerja Pemerintah Daerah	Gambaran pencapaian suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006)	Skor Kinerja
2.	Ukuran Daerah	Ukuran daerah menunjukkan besar/kecilnya suatu perusahaan (Patrick, 2007)	Total Aset dalam Neraca Pemda
3.	<i>Leverage</i>	Besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. (Sumarjo, 2010)	$\frac{Debt}{Equity}$
4.	Temuan Audit	Kasus-kasus yang ditemukan BPK pada laporan keuangan pemda atas pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan (Sudarsana, 2013)	$\frac{Temuan\ Audit}{Total\ Belanja\ Anggaran}$
5.	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	Kegiatan dan atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. (IHPS BPK RI Semester I 2015)	$\frac{Tindak\ lanjut\ sesuai\ rekomendasi}{Total\ rekomendasi}$

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Data yang digunakan merupakan Lapoan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI dan Peringkat Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari *website* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda yang diolah menggunakan IBM SPSS 21. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji

normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model penelitian yang baik dalam analisis regresi berganda harus terlebih dahulu lolos dalam pengujian asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan tiga uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, terbebas dari gejala multikolinieritas, serta bebas gejala

heteroskedastisitas. Maka, penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil uji menunjukkan bahwa Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,188. Nilai *Adjusted R Square* yang positif menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Hasil ini dapat dikatakan bahwa sebesar 18,8% variabel-variabel independen dapat

memprediksi atau menjelaskan variabel dependen, Artinya bahwa ukuran daerah, *leverage*, temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 18,8%, sedangkan sisanya sebesar 81,2% diprediksi dan dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji hipotesis penelitian disajikan Tabel. 6.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	β	Sig.	α	Hasil
1.	H ₁ Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah	0,041	0,037	0,05	H ₁ Diterima
2.	H ₂ <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah	-0,324	0,857	0,05	H ₂ Ditolak
3.	H ₃ Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah	-3,060	0,007	0,05	H ₃ Diterima
4.	H ₄ Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah	0,190	0,011	0,05	H ₄ Diterima

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis pertama penelitian ini, menunjukkan bahwa ukuran pemda berpengaruh secara positif terhadap kinerja pemda. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sumarjo (2010) dan Kusumawardani (2012) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran pemda terhadap kinerja penyelenggaraan pemda. Hal ini mengisyaratkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil ini sesuai dengan *stewardship theory*, dimana pemerintah telah bekerja keras atas dasar motivasi pengabdian dan pelayanan terhadap rakyat. Ukuran daerah yang menggambarkan total aset mampu mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berarti bahwa pemerintah daerah sebagai steward mampu mengelola aset yang dimilikinya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik

untuk mensejahterakan rakyat sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Pemda

Hasil kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemda. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemda dalam penelitian ini sudah memiliki dana internal yang cukup untuk membiayai pemerintahannya sendiri sehingga dana dari pihak eksternal tidak terlalu besar (Sestyonigtyas, 2012). Hasil ini sejalan dengan penelitian Minarsih (2015) dan Retnowati (2014) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemda.

Tidak berpengaruhnya *leverage* secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda kemungkinan *leverage* dari beberapa pemda memiliki rasio yang kecil dikarenakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk memperoleh pinjaman dari pihak eksternal terlalu rumit.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah hanya sedikit menggunakan *leverage* sebagai sumber pendanaan, dan itupun bukan untuk kegiatan operasional pemerintahan (Sestyoningtyas, 2012). Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Bastian (2005) yang mengatakan bahwa pendanaan sektor publik adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah menurut UU. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Keempat pendapatan tersebut, pinjaman daerah adalah alternatif terakhir yang dapat dimanfaatkan oleh pemda karena kedua hal tersebut tidak memiliki resiko yang tinggi, tidak ada beban bunga.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemda

Pengujian hipotesis ketiga penelitian ini menghasilkan bahwa temuan audit berpengaruh secara negatif terhadap kinerja pemda. Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa semakin besar nilai temuan audit pada suatu pemerintah daerah maka menurunnya kinerja pemda yang dinilai dengan skor kinerja yang diperoleh. Penelitian ini tidak sejalan dengan Noviyanti dan Kiswanto (2015), dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriarsari (2012) dan Sudarsana (2013) yang mengatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan skor kinerja. Hal ini berarti pemda harus lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah akuntansi saja tetapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil ini tidak sesuai dengan *stewardship theory* yang menyatakan bahwa para manajer tidak termotivasi oleh tujuan

individu tetapi lebih ditujukan pada hasil utama untuk kepentingan perusahaan. Adanya temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa *steward* adalah pihak yang dapat dipercaya dan bertindak secara baik untuk kepentingan publik ternyata justru lebih mementingkan kepentingan individu untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Hal ini tentunya menyebabkan tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan rakyat daerah tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan dapat menurunkan kinerja pemda.

Pengaruh Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa tindak lanjut temuan audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak rekomendasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, maka semakin meningkat pula kinerja pemda. Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan bahwa BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemda. Pemeriksaan yang oleh BPK akan bermanfaat jika menghasilkan rekomendasi atau temuan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel di pemerintahan. Secara substansial, yang maksud kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah terciptanya perbaikan atau peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemda yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan Sari (2013) yang menemukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap tata kelola pemerintah yang baik. Sari (2013) menyatakan bahwa dengan adanya penyelesaian rekomendasi dalam pemerintahan, maka dapat meningkatkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hal penelitian ini sejirama dengan *stewardship theory* yang mengatakan

bahwa *steward* akan memiliki motivasi guna bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Tindak lanjut rekomendasi audit yang dilaksanakan pemda menunjukkan bahwa pemda berusaha melaksanakan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran daerah, *leverage*, temuan audit, dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemda di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja pemda di Pulau Jawa tahun 2014. *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Temuan audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemda di Pulau Jawa tahun 2014.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan dan/atau menambah variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan seperti variabel indikator kinerja kunci (IKK). Selain itu, dapat pula menjadi mengkombinasikan komponen-komponen penilaian skor kinerja : seperti kinerja bidang urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, E. S. D. (2008). Faktor Penentu Belanja Modal Dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, 450–476.

Bastian, I., Soepriyanto, G. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Gamayuni, R. R. (2016). The Effect of Local Government Characteristics and the Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institution on Economic Growth , with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lampung Province, 7(18), 75–81.

<http://appejawa.navperencanaan.com/whypromotion/viewjawa>. "Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa". Diunduh pada tanggal 13 Maret 2017

<http://www.beritasatu.com/nasional/44588-jawa-timur-raih-provinsi-kinerja-terbaik.html>. "Parameternya, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik". Diunduh pada tanggal 25 Juli 2017

Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>

Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), 1–16.

Martani, D., & Lestiani, A. (2012). Disclosure in Local Government Financial Statements : the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*, 3(1), 67–84.

Minarsih, R. A. (2016). Pengaruh Size, Wealth, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah

Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi 15, 2012* (32).

- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Patrick, P. A. (2007). *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 73/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 3/2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 6/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Rusmin, R., Astami, emita w., & Scully, G. (2014). Local Government Units in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 8(2), 88–109.
<https://doi.org/10.14453/aabfj.v8i2.7>
- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan , Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan B, (September 2013), 25–28.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 2(6), 1–13.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia).
- Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 60-66.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 15. (2004). Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32. (2004). Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yulianingtyas, D. S. & R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Keatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia) Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 30–42.